

POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK SADAR WISATA PANDAWA DIENG KULON DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

Dyah Uswatun Khasanah – 14010115130096

dyah.uswatun1@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Drs. Turtiantoro, M.Si.**

turtiantoro@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Dieng merupakan suatu kawasan potensial yang memiliki keberagaman objek wisata alam maupun budaya. Dalam mempertahankan kelestarian cagar budaya serta kondisi alam yang memiliki keunikan tersendiri. Maka dilakukanlah suatu kemitraan antara Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dengan Kelompok Sadar Wisata Dieng Kulon tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Selain itu juga untuk mendiskripsikan tujuan dan manfaat serta menjelaskan kendala –kendala dalam proses kemitraan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Objek penelitian di Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten banjarnegara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kelompok Sadar Wisata cukup berhasil, terlebih dalam hal pembinaan masyarakat untuk mengubah mindset akan pentingnya menjaga alam serta menyadarkan masyarakat untuk sadar wisata. Dari keberhasilan ini tentunya berdampak positif terhadap masyarakat yaitu meningkatnya pendapatan sehingga mengubah taraf kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Hanya saja, kemitraan yang dilakukan sebatas pembinaan terhadap masyarakat dan belum adanya pengembangan pada objek –objek wisata. Kurangnya pengawasan terhadap ketertiban pedagang serta kebersihan maupun kenyamanan dalam hal kuliner. Selanjutnya dalam bidang promosi masih kurang gencar dilakukan oleh pemerintah.

KATA KUNCI

Kemitraan, Desa wisata, Dieng

Pendahuluan

Pengelolaan sumberdaya menjadi hak suatu Daerah untuk mengelolanya menjadi pemasukan pendapatan untuk menjalankan pemerintahan Daerah itu. Baik pengelolaan sumberdaya Manusia maupun sumberdaya Alam dengan tidak merugikan bahkan merusak sumberdaya tersebut. Pengembangan sumber daya alam dapat berupa pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada didaerah tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan perekonomian masyarakat serta daerah. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, dan meningkatkan keterampilan dalam masyarakat.

Seperti dapat dilakukannya kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk membentuk suatu hubungan yang dapat memberikan keuntungan bersama. Dengan hal tersebut juga dapat memandirikan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan pemerintah daerah. Memberikan pelatihan –pelatihan, menyediakan sarana dan prasarana, melengkapi fasilitas, menyediakan lapangan pekerjaan yang kemudian masyarakat akan dapat menciptakan nilai jual yang tinggi.

Istilah kemitraan seringkali dipertukarkan dengan banyak istilah lain seperti kolaborasi, aliansi, ko-produksi atau konsorsium. Istilah-istilah ini sebenarnya sebagai perwujudan dari kerjasama antar individu atau kelompok yang saling membantu, saling menguntungkan dan secara bersama-sama meringankan pencapaian tujuan yang telah mereka sepakati bersama. Permasalahan definisi ini kemudian diikuti dengan pernyataan mendasar bahwa kemitraan sebagai proses, produk, hasil penjelajahan, atau hasil akhir, hal ini dikemukakan oleh Borrini Feyerabend.

Kemitraan berusaha melibatkan masyarakat, baik dalam bentuk kelompok maupun individual. Vigoda menyebut mereka sebagai “social players” yang memiliki tingkatan kepentingan, keahlian, sumberdaya dan kemampuan pengambilan keputusan yang bervariasi. Kondisi ideal dari proses kemitraan di mana masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah sebagai penanggung jawab pemerintahan bertindak sebagai sepasang “partner” dalam proses pengambilan keputusan. Khususnya dalam proses pemberian pelayanan, warga negara harus diperlakukan sebagai rekan kerja, dan bukan sebagai subjek atau pelanggan.

Pokdarwis “Dieng Pandhawa” berdiri pada tanggal 4 Desember 2010 tentang pengukuhan Pokdarwis oleh Disbudpar Kabupaten Banjarnegara dengan SK Nomor 556/028/Tahun 2010. Pokdarwis Dieng Pandhawa adalah sebuah kelompok yang menjadikan kelembagaannya menjadi forum rembug/komunikasi masyarakat pariwisata Kawasan Dieng berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara merupakan Pokdarwis pertama yang di bentuk di kawasan Dieng Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo dan Batang . Diketahui Desa Wisata Dieng memiliki banyak potensi yang masih harus dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadikan masyarakat lebih kreatif dan sadar akan lingkungan yang mereka miliki. Tidak hanya itu Desa Wisata Dieng ini juga menjadi 25 Desa Wisata terbaik pada tahun 2014. Peningkatan pengunjung disetiap tahun akan menjadi promosi secara tidak langsung dikalangan masyarakat. Penting untuk menjalin kemitraan karena pariwisata merupakan andalan utama sumber pendapatan, berbagai objek wisata alam maupun wisata budaya, berbagai candi yang dapat dijadikan edukasi, serta ritual budaya Dieng yang dilakukan setiap tahun, dan tempat wisata buatan yang mendukung. Kemudian berbagai produk khas olahan masyarakat setempat sebagai cenderamata.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini membahas beberapa hal yaitu bagaimana pola kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Banjarnegara, kemudian apa tujuan dan manfaat adanya pola kemitraan tersebut, dan apa kendala dalam proses kemitraan dan pengembangan pariwisata.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Kemitraan, Pola Kemitraan, Pengembangan Desa Wisata dan Desa Wisata, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pola kemitraan

Menurut Sulistiyani (2004) Kemitraan dilihat dari pespektif etimologi diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam suatu hubungan kerjasama yang terjalin dapat saja tercipta karena suatu keterpaksaan yang mengharuskan meminta bantuan dari pihak lain tentunya dengan memberikan imbalan berupa kesuksesan yang diraih dapat bermanfaat bagi pihak tersebut. Keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan dana, fasilitas serta promosi merupakan kendala suatu proyek yang menjadikan proses kerjasama terjadi. Kemitraan timbul karena ketidakmampuan suatu pihak dalam menjalankan urusan di bidang tertentu, sehingga untuk mencapainya mereka mengajak pihak-pihak yang dapat menguntungkan bersama serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Kemitraan atau *partnership* dikatakan sebagai hubungan yang terjadi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Menurut adisasmita dalam konsep kemitraan terdapat persyaratan dan dasar untuk melakukan kemitraan yaitu adanya prinsip yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dimana masing-masing pihak bermitra harus mendapatkan keuntungan bersama dalam melakukan suatu kemitraan.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sumarto (2009:116) bahwa *partnership* adalah hubungan yang terjadi antara civil society, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Menurut Anderson yang dikutip oleh Ibrahim menjelaskan yang menjadi karakteristik atau ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan adalah :

1. Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak).
2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal,pekerja atau gabungan dari keduanya.
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma)dan mitranya.

Sesuai dengan pernyataan Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan bersama
- c. Ada kesepakatan antara pemerintah dan swasta dalam memberikan efek positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar.
- d. Saling membutuhkan antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Tujuan terjadinya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak –pihak yang bermitra, bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang

antara satu dengan lainnya. Dengan demikian kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mendapat pengetahuan tentang kerjasama, kemandirian terhadap masyarakat dengan menciptakan karya – karya baru yang memiliki nilai jual tinggi.

Menurut Kouwenhoven yang dikutip dari Kooiman untuk menjamin keberhasilan kemitraan, diperlukan kondisi-kondisi berikut yang juga dikenal sebagai *process conditions*, yaitu :

1. *Mutual trust*
2. *Unambiguity and recording of objectives and strategy*
3. *Unambiguity and recording of the division of costs, risks and returns*
4. *Unambiguity and recording of the division of responsibilities and authorities*
5. *Phasing of the project*
6. *Conflict regulation laid down beforehand*
7. *Legality*
8. *Protection of third parties interests and rights*
9. *Adequate support and control facilities*
10. *Adequate support and control facilities*
11. *Business and market oriented thinking and acting*
12. *„internal“ coordination*
13. *Adequate project organization.*

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (equity). Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya.
2. Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan.
3. Saling menguntungkan. Kemitraan harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pola Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologi diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Sulisstiyani (2004:130-131) Kemitraan dapat dibedakan menjadi:

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, duaagen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Menurut Sulistiyani (2004:131-132) Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya adalah:

1. *Subordinate union of partnership*

Yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear collaborative of partnership*

Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.

Sedangkan menurut OECD yang dikutip oleh Mahmudi yaitu operasi pemeliharaan, desain-bangun, operasi jenis *turnkey operation*, *wrap around addition*, sewa-beli, privatisasi temporer, sewa-bangun-operasi, banguntransfer-operasi, bangun-miliki-operasi-transfer, bangun-miliki-operasi.

Desa Wisata

Didalam UU No. 10 Tahun 2009, Kepariwisata yaitu Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pengusaha.

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya. Menurut Inskeep mengatakan Desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil

wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat.

Menurut Muliawan mengatakan Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini juga dikatakan Muliawan mengenai kriteria dari desa wisata yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata), baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan.
- b. Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan, yang antara lain berupa : akomodasi/penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan/tamu, atau fasilitas pendukung lainnya.
- c. Memiliki interaksi dengan pasar (wisatawan) yang tercermin dari kumunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.
- d. Adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat terhadap pengembangan desa tersebut terkait dengan kegiatan kepariwisataan (sebagai desa wisata)

Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata, Pearce mengatakan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi.

Apabila pengembangan desa wisata ini berhasil dapat memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat maupun pariwisata dan kebudayaan. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu cara untuk mencapai pemerataan pembangunan pariwisata dan manfaatnya, sebagaimana dicita-citakan oleh UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Menurut Muliawan prinsip pengembangan desa wisata yang merupakan salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip –prinsip antara lain :

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat.
- b. Menguntungkan masyarakat setempat.
- c. Berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat.
- d. Melibatkan masyarakat setempat.
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor seperti yang dikatakan oleh Damanik :

1. Wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi.
2. Wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan.
3. Dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Menurut Karyono komponen-komponen dalam pengembangan desa wisata adalah :

- a. Atraksi dan kegiatan wisata, atraksi wisata dapat berupa seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan lain lain yang merupakan daya tarik wisata. Atraksi ini memberikan ciri khas daerah tersebut yang mendasari minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Kegiatan wisata adalah apa yang dikerjakan wisatawan atau apa motivasi wisatawan datang ke destinasi yaitu keberadaan mereka disana dalam waktu setengah hari sampai berminggu-minggu.
- b. Akomodasi, akomodasi pada desa wisata yaitu sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit- unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- c. Unsur institusi atau kelembagaan dan SDM, dalam pengembangan desa wisata lembaga yang mengelola harus memiliki kemampuan yang handal.
- d. Fasilitas pendukung wisata lainnya, pengembangan desa wisata harus memiliki fasilitas –fasilitas pendukung seperti sarana komunikasi.
- e. Infrastruktur lainnya, infrastuktur lainnya juga sangat penting disiapkan dalam pengembangan desa wisata seperti sistem drainase.
- f. Transportasi, transporasi sangat penting untuk memperlancar akses tamu.
- g. Sumberdaya lingkungan alam dan sosial budaya.
- h. Masyarakat, dukungan masyarakat sangat besar perannya seperti menjaga kebersihan lingkungan, keamanan, keramah tamahan.
- i. Pasar domestik dan mancanegara pasar desa wisata dapat pasar wisata domestik maupun mancanegara.

Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon Dalam Pengembangan Pariwisata

Kemitraan tersebut berlangsung sejak ditetapkannya SK Nomor 556/026/Tahun 2011, Tanggal 4 Desember 2010 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. SK tersebut merupakan ketetapan berdirinya Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandhawa. Dengan ditetapkannya SK tersebut maka terjalin suatu hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Kelompok Sadar Wisata, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, fasilitasi serta regulasi kepada Kelompok Sadar Wisata untuk menjalankan program Desa Wisata.

Keterlibatan beberapa aktor sangat penting dalam menjalankan kerjasama, aktor merupakan kunci utama dalam hubungan kerjasama, untuk dapat mencapai sebuah tujuan maka masing – masing pihak berkolaborasi untuk mewujudkannya. Hal ini juga akan menunjukkan seberapa baiknya hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat, organisasi ataupun lainnya, sebagai perwujudan pemerintah yang baik (Good Government). Seperti yang

dikatakan oleh Thoha, “Good governance adalah tata pemerintahan yang baik yang merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen atau civil society) dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta.

Kemitraan yang terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Kelompok Sadar Wisata bermula dari salah seorang anggota Kelompok Pemuda Karang Taruna Desa Dieng yang merasa resah dengan perilaku remaja lainnya yang sering berkelahi, serta melakukan tindakan –tindakan yang tidak baik. Kemudian pada tahun 2009 telah terjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan erosi, krisis air, serta penggunaan pestisida yang berdampak pada kesehatan manusia. Hal ini tidak lain juga dampak dari mata pencaharian masyarakat Dieng Kulon sebagai petani kentang yang mengandalkan alam, iklim, dan kawasan hutan yang luas. Tanaman kentang membutuhkan pestisida yang cukup banyak, karena penggunaan yang sudah bertahun-tahun maka efek negatif dari pupuk kimia tersebut mulai dirasakan. Kawasan yang seharusnya dijadikan sebagai lahan penyangga, tetapi digunakan untuk lahan pertanian oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pengunungan Dieng Kulon memiliki kebiasaan untuk menanam semua lahan yang ada di wilayah mereka sebagai lahan pertanian kentang yang memiliki penghasilan sangat tinggi, namun tidak dengan kondisi alam yang sekarang mulai menurun dan tidak dapat menghasilkan panen raya kentang dengan kuantitas dan kualitas tinggi.

Maka dengan adanya kegiatan lain baik dari pemuda Desa maupun petani kentang akan mengurangi kerusakan lingkungan dan mengalihkan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Salah satu anggota Karang Taruna mulai menginisiasi adanya kegiatan dibidang selain pertanian yaitu bidang Pariwisata yang didukung dengan adanya potensi –potensi alam Desa Dieng yang belum dikembangkan dengan baik. Desa Dieng Kulon memiliki potensi dalam bidang pariwisata baik alam maupun budaya. Desa Dieng Kulon memiliki potensi wisata alam seperti kompleks Candi Arjuna dan Kawah Sikidang yang dapat menarik perhatian wisatawan. Serta hasil pertanian khas Dieng seperti carica, purwaceng, yang sekarang dijadikan sebagai ikon Kabupaten Banjarnegara. Dari hal tersebut Pak Alif sebagai ketua Karang Taruna mengunjungi Dinas Pariwisata untuk berkonsultasi mengenai pemberdayaan dibidang pertanian karena sebagian besar bermata pencaharian petani, kemudian Dinas Pariwisata mengenalkan suatu program pemberdayaan masyarakat berbasis Pariwisata. Berawal dari sinilah Pak Alif mulai menginisiasi pembentukan Kelompok Sadar Wisata yang memiliki konsep pariwisata berbasis masyarakat.

Pelaksanaan Kemitraan akan berjalan sesuai yang diharapkan tidak lepas dengan adanya peran masing –masing pihak yang saling berkolaborasi satu sama lain. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran sebagai Fasilitator, Pembinaan, serta Regulasi yang artinya Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan, memberikan legalisasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Melakukan pembinaan melalui pelatihan, seminar, memberikan panduan dan standar ataupun sosialisasi homestay, pemandu wisata, pemasaran, promosi, home industri. Kemudian peran dari Pokdarwis adalah sebagai objek, pelaksana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, sebagai kelompok masyarakat yang menggerakkan sadar wisata, serta sebagai pengontrol terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Tujuan

Didalam kemitraan yang terjalin antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan kelompok Sadar Wisata Desa Dieng Kulon ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pelatihan serta fasilitasi. Tujuan kemitraan tersebut yaitu untuk membentuk masyarakat yang sadar wisata, mengubah pola kehidupan masyarakat petani Dieng Kulon menjadi masyarakat *entrepreneur* dengan memanfaatkan semua sektor didalam Pariwisata Dieng Kulon. Dengan membuka peluang usaha seperti penginapan, kuliner dan

oleh –oleh khas Dieng, Souvenir, pemandu wisata. Yang akan menghasilkan keuntungan lebih sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dieng, serta taraf kehidupan juga akan meningkat.

Kemudian tujuan kemitraan bagi Pemerintah Daerah adalah untuk mengurangi pengangguran, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk keberlangsungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Tujuan lainnya yaitu untuk pengembangan Pariwisata didalam Desa Wisata tersebut.

Manfaat

Didalam kemitraan yang terjalin antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan kelompok Sadar Wisata Desa Dieng Kulon terdapat beberapa manfaat bagi masyarakat diantaranya yaitu mendapatkan pembinaan yang intensif dari yang sulit untuk menerima Desa Wisata karena pariwisata masih dianggap suatu hal yang tidak bermanfaat dan bernilai negatif, tidak mengerti bagaimana memposisikan diri ketika wisatawan datang, sampai pada akhirnya beberapa masyarakat mulai tergabung kedalam kelompok Sadar Wisata Dieng Kulon dan ikut berpartisipasi untuk pengembangan Desa Wisata. Selain masyarakat yang ikut berpartisipasi Desa Dieng juga mempunyai manfaat yaitu meningkatnya pemasukan keuangan Desa. Manfaat lainnya yaitu ketika Pokdarwis melaksanakan *event* maka akan di bantu atau di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian manfaat kemitraan lainnya bagi Pemerintah Daerah yaitu terwujudnya arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Kabupaten banjarnegara tahun 2020 yaitu mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan. Berjalannya program pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah dengan adanya Kelompok Sadar Wisata. Pendapatan Asli Daerah meningkat yang dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

Kendala Kemitraan

Hambatan didalam proses Kemitraan antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kelompok Sadar Wisata ada beberapa hal yaitu sulit untuk mengubah pola pikir mengenai Pariwisata. Dengan pendidikan yang kurang maka mereka akan menolak dan tidak mau menerima pariwisata tersebut berada di wilayah masyarakat Dieng. Sumber Daya Manusia yang sulit untuk mengikuti partisipasi Sadar Wisata serta mengubah pola pikir masyarakat yang bersikap kurang perhatian terhadap lingkungan, kurang perhatian terhadap keberlangsungan hidup keturunan mereka di masa yang akan datang. Kemudian juga terdapat hambatan untuk pendanaan ketika kelompok Sadar Wisata mempunyai suatu *event* yang dapat menghabiskan banyak biaya mereka akan mendapat bantuan yang sangat kurang untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga harus mencari sponsor yang banyak.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah disajikan pada bab II dan III, maka beberapa kesimpulan yang relevan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pola kemitraan antara Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara) dengan Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon dapat dikatakan cukup berhasil dalam hal pemberdayaan masyarakat Dieng Kulon. Kemitraan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan Kelompok Sadar Wisata ini tidak mengelola suatu objek wisata yang ada di Dieng Kulon, melainkan berupa Pembinaan, pelatihan, promosi dan fasilitasi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Terdapat beberapa bidang yang berhasil dalam kemitraan tersebut yaitu *homestay*, pemandu wisata dan industri makanan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang semakin meningkat dan dapat mempertahankan wisatawan

untuk berada di Dieng beberapa hari bahkan datang kembali. Pola Kemitraan yang terjadi saat ini termasuk kedalam kemitraan semu karena sudah tidak seperti dulu pada saat awal berdirinya Kelompok Sadar Wisata yang cukup intens.

2. Dari keberhasilan beberapa bidang tersebut menghasilkan masyarakat yang sadar wisata dan berhasil mengubah sebagian mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi pelaku usaha yang bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru seperti home industri Carica, Purwaceng, dan Kentang. Didalam Kelompok Sadar Wisata ini ditekankan pada pengolahan hasil pertanian selain lebih menguntungkan juga menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan pendapatan masyarakat sehingga taraf kehidupannya pun ikut meningkat. Namun, masih kurang dalam peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mengelola UKM, kuliner, serta lahan pedagang.
3. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kemitraan Namun kemitraan tersebut hanya berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk sadar wisata. Belum adanya kemitraan yang mendorong pada pengembangan destinasi wisata baru. Untuk menularkan sadar wisata kepada orang lain juga membutuhkan usaha dan waktu yang lama. Kemudian kemitraan lain yang dilaksanakan oleh keduanya yaitu dalam bidang Promosi dan Pemasaran. Promosi yang dilakukan oleh Pemerintah nyatanya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dibanding dengan promosi yang dilakukan oleh masyarakat, pembuatan *branding* juga dinilai lambat dan tidak inovatif, kreatif serta inspiratif. Karena Dieng berbatasan Kabupaten Banjarnegara dengan Wonosobo sehingga keduanya hampir memiliki *branding* yang sama. Hanya saja Pemerintah Daerah Banjarnegara tidak gerak cepat akan hal tersebut.

Saran

Dari beberapa kesimpulan tersebut, maka saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kemitraan perlu di tingkatkan kembali, sebagaimana diketahui bahwa didalam pelaksanaan kemitraan juga terdapat pengawasan, sehingga apabila semakin kurang pelaksanaan kemitraan maka semakin tidak ada pengawasan. Kemudian peningkatan pelaksanaan kemitraan dalam bidang kerajinan yang perlu dikembangkan lagi.
2. Peningkatan pelestarian alam untuk masa depan generasi bangsa. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia untuk pengelolaan Ukm yang berkualitas baik dari produksi maupun dari tempat produksi. Penertiban pedagang –pedagang di penggiriran agar lebih rajin, bersih dan nyaman. Menekankan pada konsep Sapta Pesona di setiap pelaku usaha.
3. Minimnya souvenir asli Dieng Kulon yang disediakan, kebanyakan tidak diproduksi oleh masyarakat setempat. Untuk pengembangan destinasi objek wisata memang memerlukan banyak biaya, setidaknya dapat berkerjasama dengan swasta yang dapat menguntungkan bersama. Perlunya fokus pada pemasaran dan *branding* untuk lebih menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang telah mengembangkan Desa Wisata Dieng Kulon, juga terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan

(*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Andriyani, Anak Agung, Istri Edhi Martono, Muhamad, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)*, Vol. 23, No 1, April 2017: 1-16. Dalam <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/download/18006/15758>.
- Atmoko, T. Praseto Hadi, 201,. *Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman*, Volume 12, Nomor 2, Dalam amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/download/87/85.
- Made Heny Urmila Dewi, Chafidfandeli, M. Baiquni, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. Vol. 3, No. 2, Agustus 2013: 129-139, Dalam <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/3976/3251>
- Melyanti, Imelda Merry, 2014, *Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo*. Volume 2, Nomor 1
- Pebriani, Ni Kadek Dwi, Tedi Erviantono, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti. *Kemitraan Pengembangan Sektor Pariwisata*. Studi Kasus: Bali Elephant Camp, Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung
- Rahmatullah, 2012, *Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola Csr: Studi Kasus Di Kota Cilegon (Model with government partnerships in managing its CSR: A case study in the City Cilegon)*, Vol. 17, No. 01 Tahun 2012. Dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52821-ID-model-kemitraan-pemerintah-dengan-perusa.pdf>
- Soekidjo Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiyani, ambar teguh, 2004, *Kemitraan dan Model –Model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Gava Media.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. hlm.116
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Daftar Informan

- Eryanto Arif – Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Umar Hinayulianto – Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Slamet Budiono – Kepala Desa Dieng Kulon
- Sabar Al Faristi – Sekretaris Desa Dieng Kulon

Alif Faozi – Ketua Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon

Bambang – Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon

Tentang Penulis

Dyah Uswatun Khasanah adalah Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.